

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI ERA PANDEMI COVID-19 BAGI MASYARAKAT DESA SUMBER BARU KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU

Martina Nur Anisa, Catur Suwastanto, Steelyana Indriasari

Martinanuranisa541@gmail.com, catur.pts@gmail.com,
steelyana.madani@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah menyelenggarakan beberapa program yang menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu program sosial yang dilaksanakan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan Berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai dasar metode pengambilan sampling. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan Triangulasi sumber untuk mengetahui keabsahan dari data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi tolak ukur proses implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur Organisasi. Komunikasi telah terjalin baik melalui aplikasi whatsapp selain itu pemerintah juga mengeluarkan aplikasi SIKS-NG. Komunikasi juga menghadapi kendala dalam proses penyaluran sehingga bantuan tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Sumber Daya yang ada sudah memiliki kompetensi dasar yang memadai yaitu pengetahuan umum dan kemampuan mengoperasikan komputer berupa Microsoft Office Word, dan Excel. Dalam proses penyalurannya masih terdapat kendala yaitu dalam hal sarana prasarana seperti mesin EDC yang belum memadai serta petugas yang terlibat belum dapat mengoperasikan aplikasi SIKS-NG dengan baik. Disposisi bagi pelaksana program telah dijalankan dengan sifat ramah tamah dan jujur. Serta struktur birokrasi yang ada ikut terlibat dan berperan aktif dalam proses penyaluran program BPNT. Para birokrat melaksanakan proses penyaluran BPNT dengan berpedoman pada SOP dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Peneliti menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam implementasi ini. Oleh karena itu peneliti memberi saran untuk melakukan pengadaan mesin EDC, melakukan pendampingan bagi para petugas yang terlibat dalam menggunakan aplikasi SIKS-NG serta solusi untuk mengatasi permasalahan bantuan yang tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Program, BPNT, Covid-19, Pandemi, Kemiskinan dan Bantuan Sosial.

ABSTRACT

The government has organized several programs that serve as social safety nets for poor families affected by the Covid-19 pandemic. One of the social programs implemented is Non-Cash Food Assistance (BPNT). Guided by the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT). This research is a Qualitative Descriptive research using purposive sampling techniques as the basis for sampling methods. Data collection is done through observation, interviews and documentation. As well as using source triangulation to find out the validity of existing data.

The results showed that there are four variables that become the benchmark for the implementation process, namely communication, resources, disposition and organizational structure. Communication has been well established through the whatsapp application besides that the government also issued the SIKS-NG application. Communication also faces obstacles in the distribution process so that assistance is not right on target in its distribution. The existing resources already have adequate basic competencies, namely general knowledge and the ability to operate computers in the form of Microsoft Office, Word, and Excel. In the distribution process, there are still obstacles, namely in terms of infrastructure facilities such as EDC machines that have not been crowded and the officers involved have not been able to operate the SIKS-NG application properly. The disposition for program implementers has been carried out with a friendly and honest nature. As well as the existing bureaucratic structure is involved and plays an active role in the BPNT program distribution process. The bureaucrats carry out the BPNT distribution process based on SOP and carry out tasks according to their respective tupoksi. Researchers concluded that there are still some shortcomings in this implementation. Therefore, researchers advise to procure EDC machines, provide assistance for officers involved in using the SIKS-NG application and solutions to overcome the problem of assistance that is not on target.

Keywords: *Implementation, Program, BPNT, Covid-19, Pandemic, Poverty and Social Assistance.*

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 masyarakat dari berbagai Negara dikejutkan dengan hadirnya wabah penyakit menular virus corona (covid-19). Wabah ini telah menjadi perbincangan dunia karena hampir semua negara mengalami guncangan karena kemunculan virus ini. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 pertama kali menyampaikan bahwa muncul kasus

kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas dikota Wuhan, provinsi Hubei, China. Pada tanggal 12 Februari 2020 World Health Organization secara resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus yang menyerang manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (covid-19). Kemudian pada tanggal 2 Maret Indonesia telah melaporkan 2 kasus terkonfirmasi covid-19. Direktur jendral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang

bernama *Tedros Adhanom Ghebreyesus* secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 menyampaikan bahwa virus corona sebagai pandemi (Friana, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase penduduk miskin per September 2021 mencapai 9,71 persen atau turun dari sebelumnya 10,19 persen pada September 2020 akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya pada Maret 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,14 persen atau sekitar 27,54 juta jiwa. Secara jumlah per orang, diketahui bahwa penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,05 juta orang dibandingkan bulan September 2020 dan menurun 1,04 juta orang dari Maret 2021. Akan tetapi presentasi kemiskinan di beberapa kabupaten masih ada yang belum mengalami penurunan salah satunya di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2021 presentasi kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 4,82 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 4,60 persen.

Dalam rangka upaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan yang seperti sudah dijelaskan, serta dalam pengembangan pada kebijakan perlindungan di bidang sosial, mulai tahun 2017 Pemerintah di Indonesia dengan resmi melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT di selenggarakan sesuai pada PERPRES RI No.63 Tahun 2017 yang berhubungan dengan penyaluran pada bantuan berupa non tunai. Program BPNT ini juga menjadi salah satu jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin yang terdampak covid-19.

Sesuai dengan penjelasan yang tercantum di Pedoman Umum BPNT, yang menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial yang mana diberikan dalam bentuk tidak berwujud uang. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, dengan melalui mekanisme berupa uang elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli

kebutuhan pangan pada agen resmi yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk langsung oleh bank penyalur dan biasa disebut E-warong. Nilai anggaran yang diberikan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebesar Rp.43,6 triliun dengan target sasaran diperluas dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dan nilai bantuan ditingkatkan dari Rp.150.000 menjadi Rp.200.000.

Dalam kaitan bantuan sosial pangan, peneliti akan berfokus pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan lebih tepatnya Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Desa Sumber Baru menjadi Desa dengan jumlah penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Angsana dengan jumlah KPM sebanyak 53 penerima berdasarkan data dari BST KEMENSOS tahun 2022. Dengan adanya program BPNT ini peneliti berharap dapat memberikan hak kesejahteraan masyarakat kategori

miskin dalam rangka meningkatkan pada ketahanan di pangan tingkat KPM serta sekaligus berupa mekanisme di perlindungan sosial dan penanggulangan pada pemutus rantai kemiskinan serta kelaparan.

Dari penjelasan di atas, dan karena peneliti menemukan proses penyaluran program BPNT yang ada di wilayah Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu berbeda dengan proses penyaluran program BPNT yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait penyaluran program BPNT. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI ERA PANDEMI COVID-19 BAGI MASYARAKAT DESA SUMBER BARU KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU”.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (Kadji, 2015) menuturkan bahwa *“Implementasi is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions“*. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah eksekutif ataupun keputusan badan peradilan yang didalamnya memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Ada banyak upaya yang dibuat oleh pemerintah agar dapat mengatur jalannya implementasi dan agar dapat menemukan solusi atas mengatasi masalah yang ingin diatasi.

Edward III 1980 didalam (Mulyadi, 2018) menyampaikan bahwa agar pelaksanaan atau implementasi termasuk tahapan yang dapat mempengaruhi beberapa aspek oleh karena itu meskipun suatu

kebijakan telah di ambil secara tepat, kemungkinan gagal akan tetap masih ada ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai, tidak tepat sasaran, dan tidak dapat optimal dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidak tercapaiannya tujuan sasaran. Edwards III dalam memberi penawaran serta mempertimbangkan bahwa terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”* Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. a)Komunikasi (*Communication*): Budi Winarno 2014 menyampaikan secara tegas bahwa agar pelaksanaan atau Implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, para pelaksana yang bertanggung jawab tau apa saja yang seharusnya mereka lakukan pada saat proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu perlu adanya perintah yang jelas, konsisten, dan akurat yang disampaikan pada

stakeholder saat pelaksanaan suatu kebijakan. b) Sumber Daya: Edward III dalam (Kadji, 2015) menyampaikan bahwa Sumber daya (*Resourches*) merupakan hal yang penting karena mencakup staf/pelaksana yang memiliki standar keahlian yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu informasi yang jelas dan terpercaya, cara penerapan kebijakan dan keantusiasann masyarakat yang terlibat pada implementasi. Adapun fungsi dari kewenangan adalah memastikan bahwasanya kebijakan telah terlaksana sesuai dengan yang dimaksudkan serta fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan) yang mana untuk memberikan pelayanan. c) Sikap Pelaksana (*Dispositions or Attitudes*): Menurut Edward III dalam (Kadji, 2015) Salah satu faktor utama dalm proses implementasi adalah sifat pelaksana. Para implementor seharusnya bukan sekedar mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapabilitas dalam melaksanakan saja. Apabila para implementor

mengharapkan proses implementasi dapat berjalan efisien seharusnya mengharapkan proses implementasi dapat berjalan efektif, maka seharusnya mereka memiliki keinginan yang kuat dan cenderung bersifat positif dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Edward III (Kadji, 2015) menyampaikan “Sekalipun sumber daya yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan telah mumpuni serta para pelaksana juga telah memahami kewajiban yang harus dikerjakan dan jalankan,akan tetapi seringkali masih ditemui hambatan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yaitu inefisiensi struktur birokrasi.

Program Bantuan Pangan Non

Tunai

Menurut penuturan Winarni (Masta, 2016) Raskin (bantuan beras miskin) adalah salah satu program sosial yang mana program ini di berikan dalam bentuk beras bersubsidi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pangan,

mengurangi biaya pengeluaran, dan memenuhi kebutuhan gizi, yang mana sasaran utamanya adalah masyarakat miskin.

Dalam sejarah perkembangannya, pada tahun 2015 KEMENSOS melakukan perubahan nama pada program bantuan sosial yaitu Raskin menjadi program bantuan Rastra (Beras Sejahtera). Tujuannya agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena selain beralih nama proses penyaluran program ini juga mengalami perubahan yaitu dari berbayar menjadi tidak berbayar (gratis). Sehingga perekonomian masyarakat bisa membaik dan mencapai kesejahteraan.

Kemudian KEMENSOS membuat program lanjutan dari Rastra yaitu program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Sebelumnya dalam program Rastra pemerintah hanya memberikan bantuan berupa beras dengan berat 10 kg per keluarga penerima manfaat, akan tetapi dalam program BPNT bantuan lebih dioptimalkan dan tercantum dalam

Peraturan KEMENSOS RI NO. 11 Tahun 2018 mengenai Bantuan Pangan Non Tunai.

Pada tahun 2017 program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dijalankan oleh pemerintah. Bantuan ini berbentuk Voucher Pangan yang digunakan sebagai alat untuk menebus atau membeli kebutuhan pangan mereka dalam bentuk apapun seperti beras, ikan, telur, ayam, minyak goreng serta sembako lainnya. Voucher Pangan ini dapat digunakan pada agen-agen khusus (toko, warung, atau pasar) yang telah ditunjuk oleh Bank penyalur, agen seperti ini disebut dengan E-warung. Program BPNT diharapkan dapat memenuhi hak dasar masyarakat miskin di Indonesia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan gizinya.

Proses Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan dengan menggunakan jaringan sistem pembayaran elektronik *interoperabilitas* dan *interkoneksi* yang dapat melibatkan Bank penyalur, prinsipal, dan perusahaan

Switching. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mencairkan BPNT yang berupa voucher dengan sembako melalui E-warong, atau agen-agen resmi yang memenuhi kriteria dan telah ditunjuk langsung oleh bank penyalur. Nilai dari BPNT yang di berikan dan dapat dicairkan barang adalah Rp.200.000/KPM/bulan.

Dalam penyaluran BPNT terdapat ketentuan tertentu untuk wilayah khusus. Program BPNT wilayah khusus merupakan bantuan pangan yang diberikan kepada KPM diwilayah dengan keterbatasan akses yang sulit dijangkau baik secara geografis, maupun ketersediaan infrastruktur nontunai sesuai hasil evaluasi Tim Pengendali.

Bantuan pangan wilayah khusus ini ditujukan pada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan program BPNT.

KPM dapat menggunakan voucher BPNT di E-Warong pada titik-titik penyaluran yang telah ditentukan dan disepakati anatar tim

koordinasi Bansos pangan dan Bank Penyalur. Pemanfaatan dapat dilakukan pada waktu yang dijadwalkan setiap 2-3 bulan sekali. Namun tidak dapat melebihi waktu 90 hari sejak jadwal penyaluran dana kerekening KPM. Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam penarikan manfaat. (Pedoman umum BPNT, 2017)

E-warong

E-warong merupakan elektronik warung gotong royong yang merupakan agen resmi yang memenuhi kualifikasi dan dipilih langsung oleh bank terpilih. E-Warong bisa diambil dari pedagang, toko, warung, atau pihak lain yang bersedia bekerjasama dengan bank penyalur. E-Warong menjadi tempat penyedia sembako dan tempat pencairan voucher Bantuan Pangan Non Tunai dari KEMENSOS kepada para KPM. E-Warong juga mencakup, usaha makro, mikro dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warong KUBE. Warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen

Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. (Pedoman umum BPNT, 2017)

Dalam penjelasan Andari (2017) disampaikan bahwa E-Warong termasuk wadah atau agen yang berperan dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Non Tunai. E-Warong seperti halnya koperasi bertugas untuk menyediakan bahan pangan dan kebutuhan pokok dengan harga yang miring, serta menyediakan kemudahan untuk para KPM agar memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cepat dan mudah.

Kartu Keluarga Sejahtera(KKS)

Kartu keluarga sejahtera (KKS) merupakan kartu yang mana mempunyai fitur uang elektronik serta tabungan atau voucher. Kartu ini berfungsi untuk alat penyaluran BANSOS untuk para KPM (Kemensos, 2017). Dalam penuturan Kurniawan (2016) dijelaskan bahwa KKS adalah sebuah tanda bagi keluarga yang memiliki hak yaitu masyarakat kurang mampu agar dapat

menerima berbagai macam BANSOS.

Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan kependekan dari *Coronavirus Disease 2019* yang mana dapat dipahami sebagai penyakit menular yang menyerang pada organ pernapasan manusia. Pada akhir tahun 2019, masyarakat didunia sedang berjuang menghadapi kerisis karena pandemi Covid-19, perkara ini bisa di anggap remeh terlebih lagi virus ini sangat cepat penularannya. Sampai 29Juni 2020 melihat dari data laman Worldmeterst jumlah kasus covid-19 di seluruh dunia sampai pada angka 10,250,322, dimana 5,558,161 korban mengalami kesembuhan dan 504,498 korban meninggal. Adapun di Negara Indonesia kasus serupa yang terkonfirmasi berjumlah 54,010 dengan jumlah korban meninggal mencapai 2,754 serta jumlah korban terkonfirmasi sembuh sebanyak 22,936. Situasi pandemi yang pada awalnya muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, berdampak besar bagi perekonomian Negara Indonesia yang kedepannya pasti akan berpengaruh pula pada ekonomi global yang dapat mengalami pelambatan serta berpengaruh pula terhadap dunia.perindustrian.

Upaya-upaya untuk meminimalisir angka penyebaran virus corona terus dilakukan

meskipun memberikan dampak pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan. Dikutip dari situs bps.go.id, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami keterlambatan dibanding triwulan I-2019 yakni dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Penurunan ekonomi berdampak pula bagi masyarakat Indonesia seperti terjadi PHK, menurunnya omset pedagang, terjadinya bangkrut, dan pengusaha dibidang jasa tidak bisa beroperasi seperti tukang ojek, supir angkot dan lain-lain.

Disamping membuat kebijakn dalam penangana medis pemerintah juga membuat bermacam-macam program kebijakan yang harapkan bisa meringankan beban masyarakat secara langsung. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah seperti pemberian bantuan dalam bentuk tunai, sembako, potongan uang listrik dan lain-lain. Pandemi ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat, diharapkan dengan kebijakan-kebijakan ini pemerintah bisa

membantu meringankan beban masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang mana peneliti berusaha untuk memotret peristiwa tersebut dan digambarkan sebagai mana adanya.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang mana didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi dan *story*. Pendekatan

kualitatif digunakan untuk menemukan atau mengembangkan teori yang sudah ada. Pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat. (S. Pujileksono, 2015).

penelitian ini membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan dari selesainya proposal penelitian yang disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian berada di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian alasan untuk memilih Desa Sumber Baru sebagai tempat penelitian karena Desa tersebut mendapat jumlah penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Angsana dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 53 keluarga per Maret 2022. Dengan beberapa pertimbangan tersebut peneliti mengharapkan bisa mengetahui bagaimana proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam sumber data ini menggunakan sumber primer dan sekunder yang proposisi disesuaikan dari tujuan dalam penelitian data ini. Data sekunder yaitu sumber dari data yang mendukung untuk digunakan dalam melengkapi sebuah data primer menjadi satu. Dalam pengumpulan data ini bertujuan untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan dari data di lapangan kemudian terhubung dengan beberapa objek yang telah dikaji, untuk mendapatkan data sekunder ini menggunakan dokumentasi. Sedangkan data primer, yaitu data diperoleh melalui pengamatan secara langsung (*observasi*), beserta wawancara dilakukan peneliti terhadap informan dimana benar-benar mengetahui apasaja penerapan dalam implementasi.

penelitian ini metode yang diambil yaitu pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang memiliki arti teknik penentuan sumber data yang menggunakan pemilihan tertentu sesuai tujuan supaya data yang di

dapat nantinya memiliki lebih *representatif* sesuai dengan kriteria lebih relevan dari fenomena penelitian ini. Agar data yang didapat dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan yang diperlukan oleh peneliti maka informan yang dipilih benar-benar mengetahui tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tanah Bumbu. Penentuan sumber data yang akan di wawancarai dilakukan secara purposive dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Gay & Diehl menyebutkan untuk penelitian deskriptif minimal jumlah sampel yaitu 10-20% dari populasi. Adapun narasumber yang di pilih harus independen yang kompeten terhadap penelitian tersebut. Sebab, data yang diperoleh dari narasumber dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian (I Made Laut Mertha Jaya, 2022). Oleh karena itu peneliti menetapkan informan sebagai berikut :

- 1) Mengetahui kejadian atau permasalahan.
- 2) Berada di daerah yang diteliti.
- 3) Merasakan dampak

atau kejadian maupun permasalahan.

- 4) Terlibat langsung dengan permasalahan.
- 5) Bisa berargumentasi dengan baik.

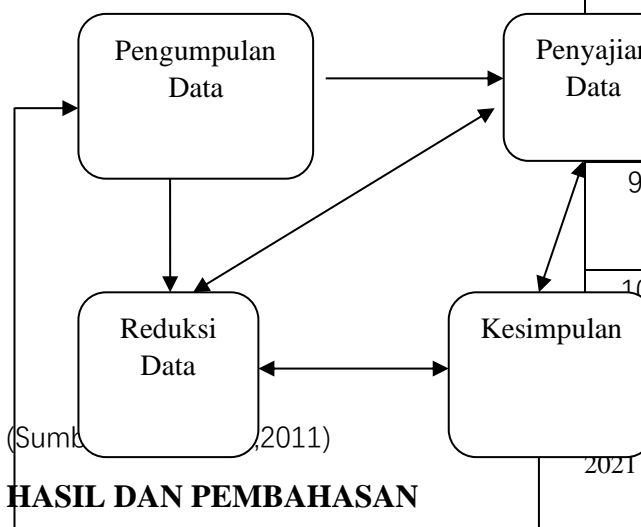
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), dalam melakukan analisis data terdapat tiga proses yang digunakan dengan interaktif; Pertama Reduksi Data, merupakan cara untuk memilih, memfokuskan, dan penyederhanaan informasi pada banyak sumber pada data seperti catatan lapangan, dokumen, arsip, dan lain sebagainya. Untuk lebih mempersingkat, mempertegas, memilih fokus, menghilangkan data yang sudah tidak digunakan, dan menata data agar data dapat disimpulkan. Kedua, Penyajian pada data seperti mengurutkan data agar dapat dipresentasikan data menjadi baik supaya lebih memudahkan untuk dipahami. Dalam memberikan data bisa berupa skema,

gambar, matrik, jaringan kerja, tabel, dan lain sebagainya. Ketiga, Menyimpulkan dan dilakukan verifikasi yang pada penarikan kesimpulan pertama masih memungkinkan untuk belum sempurna, skeptis, dan terbuka. Adapun kesimpulan terakhir dapat dibuat setelah penghimpunan dari data terakhir.

Tabel 1. Daftar Jumlah KPM di Kecamatan Angsana

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1	Angsana	556
2	Batu Licin	550
3	Karang Bintang	684
4	Kuranji	563
5	Kusan Hilir	1.316
6	Kusan Hulu	693
	Mantewe	1.094
	Satui	939
9	Simpang Empat	669
10	Sungai Loban	616
	Jumlah	7.680

Sumber: Dinsos Kabupaten Tanah Bumbu



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Angsana juga menjadi salah satu wilayah pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut tabel jumlah KPM di Kabupaten Tanah Bumbu per Agustus 2021:

Agar dapat melihat dan menilai proses implementasi program BPNT di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, peneliti menggunakan model dasar yang disampaikan oleh Edwards III bahwa terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yakni:

“*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*” Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokras. Dengan merujuk pada variabel-variabel ini diharapkan dapat mengetahui keberhasilan implementasi program BPNT di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Komunikasi

Komunikasi dapat dinilai dari pelaksanaan sosialisasi, respon masyarakat terhadap program BPNT serta media informasi untuk memperlancar komunikasi. Adapun komunikasi yang dilakukan pada proses implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana telah mengalami perbaikan yaitu dengan adanya upaya dari pemerintah untuk mengeluarkan aplikasi SIKS-NG. Selain itu pemerintah juga telah melaksanakan pengarahan dan Bimtek untuk para implementor. Adapun untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan

para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) para implementor di Desa, Kecamatan dan Daerah membuat forum obrolan dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Tidak hanya secara daring atau onlin pihak TKSK, pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan juga membuka sesi konsultasi langsung untuk para KPM yang memiliki kesulitan, pertanyaan serta permasalahan terkait BPNT.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Eko Yudianto Yunus (2019) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang menyebutkan bahwa Komunikasi yang terjalin antar organisasi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warong dan RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tidak terjadi miskomunikasi. Hal ini dikarenakan sebelum pelaksanaan program sudah ada sosialisasi dari Kementerian Sosial yang cukup baik.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Eny Mufatiroh et all (2020) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kelurahan Sumput Kecamatan Driyoreja. Dalam jurnal tersebut dia menyebutkan bahwa komunikasi antar organisasi telah memenuhi unsur kejelasan. Hal tersebut didukung dengan menggunakan media penyampai komunikasi baik secara langsung maupun melalui grup media sosial whatsapp sehingga komunikasi dalam Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) melalui E-Warong di Kelurahan dan Kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik.

Sumber Daya

Sumber Daya dapat dinilai dari kompetensi implementor, anggaran serta logistik. Sumber daya yang ada di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah memiliki kompetensi. Para implementor memiliki pengetahuan umum, keterampilan dalam

mengoperasikan komputer umumnya seperti Microsoft Office Word, dan Excel serta sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi. Dibuktikan dengan kontribusi dan sifat pro aktif para implementor yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk anggaran oprasional khusus program ini memang tidak ada karena ini merupakan program pemerintah pusat jadi instansi pemerintah di daerah memiliki kewajiban untuk membantu merealisasikannya dan mensuport dengan menyediakan logistik yang dibutuhkan seperti gedung tempat penyaluran BPNT. Meskipun begitu masih ditemukan kekurangan dalam proses penyalurannya program BPNT yaitu dalam hal sarana prasarana seperti mesin EDC serta belum dapat mengoprasikan aplikasi SIKS-NG dengan baik

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Eko Yudianto Yunus (2019) dengan Judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang menyebutkan

bahwa Sumber Daya di dalam Implementasi Kebijakan diperlukan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dibutuhkan sumber daya yang kompeten dalam implementasi kebijakan. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial menyebutkan bahwa banyak aktor yang terkait dalam program ini. Keberhasilan Implementasi Program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari aktor-aktor pelaksana yang terdiri dari pendamping BPNT, Koordinator di Kelurahan serta masyarakat setempat yang ikut membantu pelaksanaannya dengan kompeten.

Hal yang sama juga di sebutkan oleh Eny Mufatiroh et all (2020) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kelurahan Sumpu Kecamatan Driyoreja bahwa sumber daya yang mempengaruhi

implementasi adalah sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di kelurahan Sumpu yaitu Koordinator Kelurahan, Pendamping Desa, Serta masyarakat setempat. Sumber daya finansial atau dana pada program BPNT ini berasal dari Kementerian Sosial yang langsung ditransfer ke rekening KPM. Adapun sumber daya waktu untuk pelaksanaan belum efektif karena uang yang disalurkan tidak setiap bulan.

Disposisi

Disposisi dapat dinilai dari komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi atau sikap para implementor kebijakan program BPNT di Desa Sumber Baru kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyalurkan bantuan sangat ramah dan baik. Selain itu mereka juga memberikan edukasi pada masyarakat yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan dari pemerintah pusat agar mau

menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang memang lebih membutuhkan hal ini bertujuan agar bantuan bisa tepat sasaran dan tujuan dari program BPNT bisa tercapai.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Eko Yudianto Yunus (2019) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang menyebutkan bahwa sikap atau kecenderungan para pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya di Kecamatan Kanigaran sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hanya saja terdapat beberapa pelaksana yang tidak ramah dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak nyaman.

Hal yang sama juga di sebutkan oleh Eny Mufatiroh et all (2020) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kelurahan Sumpit Kecamatan Driyoreja bahwa pihak yang terlibat telah memberikan

respon yang baik terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Kelurahan Sumpit Kecamatan Driyorejo.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dapat dinilai dari SOP dan Fragmentasi. penyaluran program BPNT di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana sudah dapat terlaksana dengan baik. Pembagian BPNT dilakukan secara serentak setiap sebulan sekali dengan menyesuaikan jadwal yang telah dibuat oleh pemerintah Kecamatan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Eny Mufatiroh et all (2019) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kelurahan Sumpit Kecamatan Driyoreja bahwa Struktur Birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam Implementasi Kebijakan yaitu berdasarkan *Standar*

Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap Implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan teori dan Variabel serta keadaan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu telah terlaksana dengan baik meskipun tidak bisa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara mengenai proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Suber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, mengenai topik permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Komunikasi dalam proses penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari

sesuai dengan SOP atau ketentuan yang ditujukan untuk wilayah umum. Hal ini dikarenakan keadaan dilapangan dengan keterbatasan sarana prasarana serta keadaan geografis yang hanya memungkinkan untuk melaksanakan penyaluran program BPNT sesuai dengan ketentuan yang diberikan pemerintah bagi wilayah khusus. Akan tetapi sudah sesuai dengan ketentuan standar implementasi yang di sampaikan oleh Edwerd III.

sosialisasi dan koordinasi yang sudah dilaksanakan oleh para stakeholder secara berkelanjutan mulai dari perubahan bantuan RASTRA menjadi Bantuan BPNT yang menggunakan kartu elektronik. Kemudian Pemerintah Daerah berupaya agar program ini berjalan dengan baik maka dibuatlah aplikasi SIKS-NG dan BIMTEK penggunaan aplikasi tersebut. Adapun untuk koordinasi secara lingkup kecil juga sudah berjalan dengan baik yaitu menggunakan media sosial (WA) sehingga membuat komunikasi bisa

berjalan dengan baik dan lebih mudah. Komunikasi yang sudah baik bisa terlihat dari pelaksanaan implementasi BPNT yang berjalan kondusif meskipun masih tetap ditemukan ada bantuan yang tidak tepat sasaran.

Sumberdaya yang ada di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sudah memadai dan kompeten. Para stakeholder mulai dari Dinas sosial, TKSK, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan KPM sudah bisa berkolaborasi dengan baik karena mereka sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, memiliki pendidikan minimal SMA, memiliki pengetahuan umum dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer umumnya seperti Microsoft Office Word, dan Excel. Meski begitupun masih ditemukan kekurangan karena masih ada beberapa operator tingkat desa yang kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG serta ketersediaan mesin SDC yang belum memadai dan merata di masing-masing Desa.

Disposisi atau karakteristik dari para implementor sudah bisa dirasakan baik oleh masyarakat penerima bantuan. Hal ini dilihat dari komitmen, kejujuran dan sifat para implementor yang ramah tamah dan fast respon.

Struktur organisasi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ikut berperan aktif sehingga memiliki peran yang signifikan terhadap implementasi program BPNT. serta mencari solusi agar implementasi program BPNT bisa tetap terlaksana meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu telah berjalan dengan baik. Meskipun masih ditemui kekurangan dalam proses implementasi program BPNT yang tidak sesuai dengan SOP secara umum. Akan tetapi penyaluran BPNT yang dilakukan di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu telah sesuai dengan

peraturan penyaluran yang diberikan pada wilayah khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Leo, Agustino. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung

Kadji, Y. 2015. Formula dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas Gorontalo UNG Press.

Budi, Winarno. 2014. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*).

Deddy, Mulyadi. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Nugroho D, R. (2009). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

Syahrudin. (2020). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Bandung: CV.Hikmah Media Utama

Phuk Tjilen, Alexander. (2019). Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi. Bandung: CV. Hikmah Media Utama

Electronic (e-book)

Kementerian Sosial RI. 2018. Pedoman Umum Bantuan Non Tunai.

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Umum Bantuan pangan Non Tunai. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Kepala Biro Hukum dan Kemensos 2016. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung (E-warung) Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Kemensos.

Lembaga Negara Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Jakarta: Lembaga Negara Indonesia.

Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2017.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Jurnal Online

- Hakim, D. B., Harianto, H & Nuralina, R (2019). Analisis Dampak Kebijakan Besar Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik Ekuilibrium Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(4), 799-808
- Rachman, Benny., Adang Agustian., dan Wahyudi. 2018. Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 16(1):1-18.
- Junaidi, Mayang Shahira. 2017. The Satisfaction Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai recipients and Rastra recipients in Cekung district East Jakarta. *Jurnal Ilmiah Econosains* 15(2).
- R Ramdani, 2016. Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dalam Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
- Kurniawan. 2016. Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Program Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(1):155-166.
- Dr.Ahmad Nizar Rangkuti, S. Si., M.Pd. 2019. Menentukan Jumlah Sample Dalam Penelitian.
- Lik Nurhikmayati. 2019. Implementasi STEAM Dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Didactical Mathematics*.
- Dara Aisyah H, M. Ali Puteh, Muhammad Sontang, Abdul Manam, Mohamad Al-Merbawi dan Ibrahim Mamat. 2013. Implementasi Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pondok Inabah Sungai Ikan Kuala Terengganu (1998-2011). *Jurnal Of Business And Social Development*.
- Dini, A. R, Nuralisa, Y, & Halim. A (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(13).
- Marhadi, Akhmad. 2017. Profil Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) KUBE PKH Sebagai Alternative Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Etnorefika* 6(3).
- Masta, M. (2016). Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. *Universitas Lampung*.
- Andari, Soetji. 2017. Pengentasan Kemiskinan Melalui

Bantuan Sosial Non Tunai.
Jurnal PKS 16 (4):427-438.

Eko Yudianto Yunus. 2019.
Implementasi Program
Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) Di Kecamatan
Kanigaran Kota
Probolinggo. Jurnal
Administrasi Negara
fakultas Ilmu Sosial dan
Politik

Eny Mufatiroh et all. 2020. Implementasi
Program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) Melalui
E-Warung Di Kelurahan
Sumput Kecamatan
Driyorejo. Jurnal Intelektual
Administrasi Publik dan
Ilmu Komunikasi

Internet

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase->

<penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021>

“Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen” (2020, 30 Juni) dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>

<http://repository.upm.ac.id/1666/1/cek%20plagiasi%20-%20IMPLEMENTASI%20BANTUAN%20PANGAN%20NON%20TUNAI%20DI%20KECAMATAN%20KANIGARAN%20KOTA%20PROBOLINGGO.pdf>